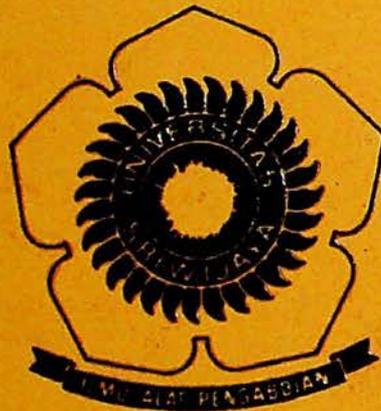


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

POTENSI PROPINSI SUMATERA SELATAN UNTUK
MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH



Diajukan Oleh:

FAJRI TANZIL
NIM. 01033130078

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008

S
332.7707
Tan
P
2008.

16691
17013.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**



SKRIPSI

**POTENSI PROPINSI SUMATERA SELATAN UNTUK
MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH**



Diajukan Oleh:

**FAJRI TANZIL
NIM. 01033130078**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FAJRI TANZIL
NIM : 01033130078
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : POTENSI PROPINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR DAERAH

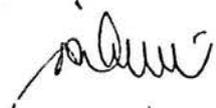
PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 29-4-08

Ketua :



Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak.

Tanggal

29/4/08

Anggota :



Arista Hakiki, SE, M.Acc, Ak.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

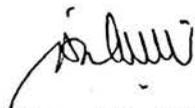
NAMA : FAJRI TANZIL
NIM : 01033130078
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : POTENSI PROPINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR DAERAH

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 12 Mei 2008 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 27 Mei 2008

Ketua,



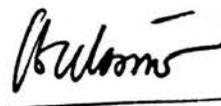
Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak
NIP 132083936

Anggota,



Arista Hakiki, SE, M.Acc, Ak
NIP 132176860

Anggota,



Abu Kosim, SE, Ak
NIP 132133709

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Rina Tjandrakirana Dp, SE, MM, Ak
NIP 132000097

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"YOUR WORD IS YOUR DESTINY"

"NOTHING IMPOSSIBLE IF YOU TRUST IN ALLAH"

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- *kedua orang tua ku tersayang*
- *adik kakak ku tersayang*
- *D.S ku tersayang*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena hanya rahmat dan ridhoNya lah yang memberikan semangat dan kemampuan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah di Univrsitas Sriwijaya. Skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna. Penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, segala komentar, kritik maupun tanggapan atas skripsi ini akan diterima dengan ikhlas.

Segala kesalahan dalam skripsi ini adalah murni tanggung jawab penulis. Namun segala manfaat yang didapat dari skripsi ini, semuanya karena Allah S.W.T.

Palembang, Mei 2008
Penulis,

Fajri Tanzil
NIM 01033130078

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Potensi Propinsi Sumatera Selatan Untuk Menerbitkan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah.” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Prof. DR. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Drs. Syamsurizal. AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Dra. Rina Tjandrakirana. DP, SE, MM, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak, Pembimbing I Skripsi.
5. Arista Hakiki, SE, M.Acc, Ak, Pembimbing II Skripsi.
6. Abu Kosim, SE, Ak, Dosen Penguji Komprehensif.
7. Semua bapak/ibu soden yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan.
9. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Teman-teman sejawat seangkatan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,

Fajri Tanzil

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Perumusan Masalah | 8 |
| 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 4. Metodologi Penelitian..... | 9 |
| 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 9 |
| 4.2. Ruang Lingkup Penelitian..... | 9 |
| 4.3. Metode Pengumpulan Data | 9 |
| 4.4. Teknik Analisis Data..... | 10 |
| 5. Sistematika Pembahasan | 11 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. Obligasi | 13 |
| 1.1. Pengertian Obligasi..... | 13 |
| 1.2. Jenis-jenis Obligasi..... | 13 |



| | |
|--|----|
| 2. Obligasi Daerah | 14 |
| 2.1. Pengertian Obligasi Daerah..... | 14 |
| 2.2. Jenis-jenis Obligasi Daerah | 15 |
| 2.3. Karakteristik Obligasi Daerah | 17 |
| 2.4. Persyaratan Penerbitan Obligasi Daerah | 18 |
| 2.5. Penggunaan Obligasi Daerah | 19 |
| 2.6. Pembayaran Kembali Obligasi Daerah | 20 |
| 2.7. Pengolahan Obligasi Daerah | 20 |
| 2.8. Kegiatan yang Dapat Dibiayai Obligasi Daerah..... | 21 |
| 2.9. Resiko Obligasi Daerah..... | 22 |
| 2.10. Proses Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah..... | 23 |
| 2.10.1. Tahap Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah..... | 24 |
| 2.10.2. Mekanisme Umum Penerbitan Obligasi Daerah di Pasar Modal | 23 |
| 2.10.2.1. Pra Registrasi dan Pernyataan Pendaftaran..... | 41 |
| 2.10.2.2. Tahap Registrasi..... | 48 |
| 2.10.3. Tahap Penawaran Umum dan Pencatatan | 52 |
| 2.11. Pelaporan Kepada Bapepam dan LK | 53 |
| 3. Kerangka Hukum Obligasi Daerah..... | 59 |
| 3.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004..... | 61 |
| 3.2. Peraturan Menteri Keuangan No.147 Tahun 2006 | 62 |
| 4. Sumber-sumber Pembiayaan Infrastruktur..... | 63 |
| 5. Analisis Rasio Keuangan pada APBD | 67 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN | |
| 1. Sejarah Singkat Propinsi Sumatera Selatan..... | 71 |

| | |
|---|-----|
| 2. Visi dan Misi Serta Tujuan Propinsi Sumatera Selatan | 72 |
| 3. Rencana Strategis..... | 73 |
| 3.1. Alur Pikir..... | 73 |
| 3.2. Tantangan | 74 |
| 3.3. Rencana Strategis (RENSTRA) 2003-2008..... | 75 |
| 3.4. Program Strategis..... | 76 |
| 3.5. Sasaran | 77 |
| 3.6. Strategi Pokok..... | 77 |
| 4. Kondisi dan Perkembangan Sumatera Selatan Terkini..... | 78 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| 1. Potensi Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Selatan..... | 82 |
| 1.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah..... | 82 |
| 1.2. Rasio Efektifitas..... | 84 |
| 1.3. Rasio Keserasian..... | 86 |
| 1.4. <i>Debt Service Coverage ratio</i> (DSCR)..... | 87 |
| 2. Pengaruh Obligasi Daerah Terhadap Anggaran Daerah | 88 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 1. Kesimpulan..... | 98 |
| 2. Saran | 100 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*) dan investasi pada aset-aset riil (*real assets*). Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat, deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya. Investasi dapat juga dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lain-lain. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk pembelian aset produktif, pembelian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lain-lain (Halim,2001).

Salah satu investasi dipasar modal adalah obligasi. Obligasi (*bond*) adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban untuk melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan pada pihak pembeli obligasi tersebut. Pihak yang membeli obligasi atau *bond holder* akan mendapatkan keuntungan melalui pembayaran kupon yang umumnya lebih tinggi dari tingkat suku bunga bank dan suatu ketika dapat pula memperoleh keuntungan lain yaitu dengan menjual obligasi tersebut lebih tinggi dari harga belinya. Dalam hal ini pemodal memperoleh *capital gain*. Tetapi ada

juga obligasi yang tidak membayar bunga secara berkala yang disebut sebagai *zero coupon bond*, obligasi jenis ini memberikan return dari tingkat diskontonya (www.idx.co.id).

Pada umumnya bunga yang ditawarkan oleh perusahaan dari penerbitan obligasi berada diantara bunga deposito dan bunga pinjaman. Melalui penerbitan obligasi perusahaan ingin mem-*by-pass* bank sebagai *intermediary* dan langsung menawarkannya kepada masyarakat sebagai investor. Dengan memberikan bunga diatas deposito, investor diharapkan akan tertarik untuk membeli obligasi, sementara perusahaan masih lebih ringan membayar bunga 15% per tahun, 3% lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman dari bank.

Sebagai instrumen investasi, obligasi menawarkan beberapa keuntungan menarik. Obligasi memberikan pendapatan tetap (*fixed income*) berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi, dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan berupa bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan obligasi, umumnya lebih tinggi dari bunga yang diberikan deposito. Sebagai tambahan, pembayaran bunga obligasi harus didahulukan sebelum perusahaan membayar deviden kepada pemegang saham. Disamping itu, dalam posisi penerbit mengalami likuidasi atau bubar, maka pemegang obligasi memiliki hak yang lebih tinggi atas kekayaan perusahaan dibanding dengan pemegang saham (www.idx.co.id).

Namun dibalik penampilan menariknya sebagai instrument investasi, namun obligasi tetap mengandung resiko. Pergerakan obligasi sangat ditentukan pergerakan suku bunga. Pergerakan harga obligasi berbanding terbalik dengan

tingkat suku bunga; artinya jika suku bunga naik maka harga obligasi akan turun, sebaliknya jika tingkat suku bunga turun maka harga obligasi akan naik.

Pemerintah Indonesia melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) menggunakan obligasi sebagai salah satu alat untuk mengelola utang, membiayai proyek pemerintah dan membiayai anggaran. Peluang ini juga dilirik oleh pemerintah daerah yang membutuhkan solusi alternatif untuk membiayai kebutuhan dana infrastruktur daerahnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimana kepada daerah diberi kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia, obligasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah telah dikenal sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Di Indonesia sendiri obligasi daerah sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebelum kemerdekaan masyarakat Indonesia telah mengenal obligasi daerah (*municipal bond*). Dalam penelitian Bachrul Elmi (2005) tentang obligasi daerah dapat diketahui bahwa pada awal dekade 1900-an dibanyak kota di Indonesia antara lain Bandung, Batavia (Jakarta), *Buitenzorg* (Bogor), dan Surabaya telah dikeluarkan obligasi daerah dengan jangka waktu tenor antara 15 sampai dengan 40 tahun. Sebagai contoh Pemda Surabaya telah menerbitkan obligasi senilai 5.000.000 dengan masa amortisasi untuk jangka waktu 40 tahun, dengan tingkat bunga 7,5%. Obligasi pada umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan di daerah perkotaan, seperti penyediaan fasilitas air bersih, pembebasan tanah, pembangunan kantor dan perumahan. Pada masa itu obligasi yang diterbitkan tidak mendapat jaminan dari pemerintah pusat di Belanda. Obligasi tersebut diterbitkan di Belanda dan

didaftarkan pada bursa di Amsterdam (Belanda) dan Batavia (Jakarta). Pasar obligasi daerah mencapai masa jaya sampai tahun 1940, yaitu sebelum Belanda dikalahkan Jerman pada masa Perang Dunia II.

Dewasa ini pemerintah telah menjalankan kebijaksanaan mendorong pemerintah daerah dan BUMD untuk dapat memanfaatkan dana dari pasar modal untuk menutupi kebutuhan sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya. Untuk itu, sampai dengan tahun 1993, telah dilaksanakan penerbitan obligasi oleh 8 (delapan) Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu BPD Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Barat, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan BPD Sulawesi Utara. Total dana yang dapat ditarik dari pasar modal adalah sebesar Rp 495 milyar (Elmi, 2005).

Pembangunan infrastruktur adalah pondasi utama bagi kemajuan suatu daerah. Gambaran umum pembangunan infrastruktur di Indonesia pasca krisis bisa dikatakan jalan ditempat, dalam arti tidak ada kemajuan yang dapat dicapai secara signifikan. Anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur baru sangat minim, demikian pula anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk infrastruktur merupakan kendala utama.

Infrastruktur merupakan aset yang sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kwik Kian Gie sewaktu masih menjabat sebagai ketua Bappenas memprediksi bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan rata-rata 6% untuk tahun 2004-2009, diperlukan Rp 613,2 triliun (US\$ 72,2 miliar) untuk membangun infrastruktur. Untuk keperluan tersebut, pemerintah diprediksi hanya mampu menyediakan dana sebesar US\$ 40,8 miliar. Sedangkan

sisanya yakni sebesar US\$ 31,4 miliar diharapkan dapat dipenuhi dari pihak swasta. Sementara itu Raden Pardede selaku ketua tim pembiayaan infrastruktur di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyatakan bahwa untuk membangun infrastruktur yang diprioritaskan untuk tahun 2006-2010, diperlukan dana sekitar Rp 210 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah diperkirakan hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar 20% atau sekitar Rp 40 triliun. Namun demikian, pihak swasta juga sulit diharapkan kesediaannya untuk membangun infrastruktur, karena beberapa hal antara lain: besarnya dana yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dalam ukuran pihak swasta sebagai entitas bisnis, rendahnya return yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur pada umumnya, serta ketidakjelasan dan sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan infrastruktur (Purwoko,2005).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai yang membutuhkan dana yang cukup besar bila hanya dibebankan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana dari pemerintah pusat. Sehingga diperlukan alternatif lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur yaitu dengan menerbitkan obligasi sebagai salah satu instrument pembiayaan pembangunan akan memberikan solusi serta manfaat bagi masyarakat, investor dan pelaku pasar modal. Walaupun demikian sebelum menerbitkan obligasi daerah pemerintah daerah harus jeli dalam menganalisis potensi daerahnya. Pemerintah daerah harus memiliki kemandirian dari sisi keuangan karena pemerintah pusat tidak akan menjamin obligasi daerah yang diterbitkan. Jadi pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan proyek-proyek yang akan dibiayai melalui obligasi daerah.

Selama ini Propinsi Sumatera Selatan hanya mengandalkan dari pos APBD yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan pinjaman asing. Pada tanggal 8 Oktober 2008 pemerintah pusat telah mengambil kebijakan untuk menghapus Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah Sumsel kehilangan dana sekitar 9 milyar rupiah.

Selama ini pemerintah daerah menggunakan pinjaman asing tapi pada saat ini pihak asing telah membatasi pinjamannya padahal pada saat ini pemerintah daerah Sumatera Selatan sedang menggiatkan pembangunan daerah untuk mencapai impiannya menjadi kota internasional. Sehingga perlu adanya sumber pendanaan lain untuk mewujudkan mimpi itu. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menganjurkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana pihak ketiga karena pada saat ini masyarakat Indonesia mulai tertarik untuk berinvestasi di pasar modal (www.depkeu.go.id). Hal ini dapat dilihat pada saat penerbitan obligasi pemerintah yang berhasil menyedot dana triliunan rupiah. Pada penerbitan ORI (Obligasi Negara Republik Indonesia) seri 002 pemerintah berhasil mengumpulkan dana Rp.6.233.200.000.000,00 dan obligasi *Zero Coupon* (ZC) seri 002 yang dilelang agustus lalu jumlah penawaran yang masuk mencapai 9 triliyun rupiah (data Bursa Efek Surabaya tahun 2007). Hal ini bisa dijadikan sebuah gambaran bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai berani berinvestasi di pasar modal. Sehingga ini dapat menjadi potensi pembiayaan yang harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Propinsi Sumatera Selatan sebagai alternatif pembiayaan.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai "**Potensi Propinsi Sumatera Selatan untuk Menerbitkan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah**"

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan masalah yaitu "*bagaimanakah potensi Propinsi Sumatera Selatan untuk menerbitkan obligasi daerah?*".

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan potensi Propinsi Sumatera Selatan untuk menerbitkan obligasi daerah yang terbatas pada masalah keuangan saja. Selain itu juga untuk melihat kinerja anggaran bila obligasi daerah diterbitkan.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Sarana aplikasi dalam menganalisis peluang investasi
 - b. Menambah wawasan mengenai keuangan daerah
2. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi input dan bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan keuangan daerah.
3. Bagi Akademisi, yaitu sebagai bahan referensi tambahan dalam proses pembelajaran atau proses penelitian.

4. Metodologi Penelitian

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Propinsi Sumatera Selatan dan obyek penelitiannya yaitu Propinsi Sumatera Selatan. Alasan penulis memilih obyek penelitian adalah karena alasan jarak tempat dengan peneliti sehingga bisa menghemat biaya. Selain itu juga penulis adalah putra daerah sehingga bisa melakukan penelitian yang lebih obyektif. Waktu penelitian dimulai sejak bulan September 2007.

4.2. Ruang Lingkup Penelitian

Permasalahan penerbitan obligasi daerah mencakup banyak hal, seperti : aspek hukum yang melingkupi masalah legalitas, selain itu juga masalah kebijakan pemerintah daerah yang terkait ekonomi yang mencakup kebijakan makro dan mikro, dan juga masalah keuangan. Tetapi dalam penelitian kali ini penulis hanya akan membahas masalah keuangan saja yang mencakup anggaran daerah.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara melalui buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan *homepage* yang terkait dengan obyek penelitian yaitu obligasi daerah dan infrastruktur. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data keuangan Propinsi Sumatera Selatan yaitu APBD Sumsel tahun 2007 yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal

3) Analisis rasio keserasian

$$\text{Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

4) Analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

$$\frac{(\text{PAD} + \text{bagi hasil pajak} + \text{Dana Alokasi Umum})}{\text{angsuran pokok pinjaman} + \text{bunga pinjaman} + \text{biaya lain-lain}}$$

5. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang tentang judul penelitian dan juga merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu juga, bab ini akan menerangkan tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yaitu metode kuantitatif deskriptif.

Bab II : Studi Pustaka

Bab ini berisikan tentang landasan-landasan teori yang akan diaplikasikan oleh penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Teori-teori yang digunakan adalah mengenai obligasi, obligasi daerah, dan keuangan daerah.

Bab III : Deskripsi Umum

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan tentang Propinsi Sumatera Selatan. Bab ini membahas tentang sejarah ringkas Propinsi

Sumatera Selatan, rencana strategis, visi dan misi, kondisi dan perkembangan saat ini.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang proses aplikasi teori-teori yang didapat yang disesuaikan dengan data-data yang dikumpulkan dan diolah sebagai patokan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diawal untuk mendapatkan jawaban yang merupakan tujuan dari penelitian.

Bab V : Kesimpulan

Bab ini membahas tentang rumusan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

-, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah.*
- *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.*
- 26 November 2007. "Investasi 2007 Tembus Rp 1,5 Triliyun". *Sumatera Ekspres.* hal. 2.
- 26 November 2007. "Pendapatan Asli Daerah Rp 2,275 Milyar". *Sumatera Ekspres.* hal. 2.
- 26 November 2007. "Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 8,24%". *Sumatera Ekspres.* hal. 2.
- 11 desember 2007. "Pendapatan Sumsel Turun Rp 90 Milyar". *Sumatera Ekspres.* hal. 13.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. "Buku Panduan Obligasi Daerah". Diambil pada tanggal 11 april 2008 dari http://www.djpk.depkeu.go.id/data/Buku_Panduan_Obligasi_Daerah.pdf
- Elmi, Bachrul. November 2005. "Analisa Obligasi Untuk Membiayai Pembangunan Daerah (*Municipal Bond*) Kasus Pemda Propinsi Jawa Barat". Edisi Khusus. Kajian Ekonomi dan Keuangan.
- Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 2007. "Buku Pedoman Penulisan Skripsi". Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Halim, Abdul. 2001. "Analisis Investasi". Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi. 5 Juli 2006. "Penerbitan Obligasi Daerah". *Kompas.*
- Hidayat, Bagja. 29 september 2004. "Pemerintah Pusat Tidak Menjamin Obligasi Daerah". *Ekonomi Bisnis.*
- Indonesia Stock Exchange. "Pengertian Obligasi" diambil pada tanggal 15 desember 2007 dari <http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/WhatisBond/tabid/89/lang/id-ID/language/en-US/Default.aspx>.
- Investopedia. 2006. "*Advanced Bond Concepts*". Diambil pada tanggal 12 November 2006 dari <http://www.investopedia.com/university/advancedbond/>

Purwoko. November 2005. "Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah". Edisi Khusus. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*.

Syahruzad, Edwin. 9 Oktober 2006. "Menyoal Peluang Obligasi Daerah". *Kompas*.